

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program bantuan sosial yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Program ini diluncurkan pertama kali pada tahun 2007 sebagai bagian dari upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan (Nurbaya, dkk., 2012:45).

PKH dirancang sebagai program perlindungan sosial dengan memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (Sari dan Putri, 2014:120). Sasaran utama PKH adalah keluarga yang memiliki anggota yang tergolong dalam kategori rentan, seperti ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.

Tujuan utama PKH adalah meningkatkan akses keluarga miskin terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Melalui bantuan yang diberikan secara berkala, PKH diharapkan dapat mendorong keluarga miskin untuk mengakses layanan dasar tersebut, sehingga dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi (Susilo, 2015:88).

Selain itu, PKH juga bertujuan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam hal pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta pendidikan yang berkualitas. Program ini memiliki pendekatan holistik dan bersifat inklusif,

dimana selain memberikan bantuan tunai, pemerintah juga melakukan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat digunakan secara optimal.

Secara keseluruhan, PKH merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia, dengan fokus pada pemberdayaan keluarga miskin agar dapat mandiri secara ekonomi dan sosial.

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Berdasarkan pandangan Kementerian Sosial Republik Indonesia, kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka secara layak, baik dari segi pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan. Hal ini menyebabkan ketidakmampuan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya di masyarakat (Hermawan, 2016:32).

Menurut Kementerian Sosial, penyebab kemiskinan di Indonesia sangat beragam dan kompleks. Beberapa faktor utama meliputi keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, rendahnya kesempatan kerja yang layak, ketimpangan distribusi sumber daya, dan terbatasnya akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi. Selain itu, bencana alam, konflik sosial, serta kebijakan ekonomi yang tidak merata juga berkontribusi terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin.

Kementerian Sosial melihat kemiskinan bukan hanya sebagai masalah ekonomi, tetapi juga sebagai permasalahan sosial yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan berkelanjutan (Lestari, 2018:75). Oleh karena itu,

pemerintah melalui Kementerian Sosial mengembangkan berbagai program untuk mengurangi kemiskinan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta berbagai program pemberdayaan sosial yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin.

Tujuan utama dari berbagai program ini adalah untuk memberdayakan masyarakat miskin agar mereka dapat mandiri dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Pendekatan yang digunakan bersifat holistik dan terintegrasi, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta, dalam upaya bersama untuk mengentaskan kemiskinan.

Kementerian Sosial juga menekankan pentingnya data yang akurat dan mutakhir untuk merancang kebijakan yang efektif (Prasetyo, 2019:92)⁶. Data kemiskinan yang terkini dan valid menjadi landasan dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, sehingga bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak yang signifikan.

Secara keseluruhan, kemiskinan menurut Kementerian Sosial merupakan tantangan yang harus dihadapi bersama dengan semangat gotong royong dan kerja sama lintas sektor, guna menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

1.2 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan mengingat permasalahan yang cukup luas, maka perlu dilakukan pembatasan masalah, objek yang dibatasi sebagai berikut:

- 1.2.1 Wilayah Penelitian: Penelitian ini akan fokus pada kecamatan Kesamben, kabupaten Jombang sejumlah 2813 KPM. Temuan dan analisis akan terbatas pada daerah ini dan tidak mencakup wilayah lain di Kabupaten Jombang atau daerah di luar Kabupaten Jombang.

- 1.2.2 Subjek Penelitian: Penelitian ini akan mengkaji dampak bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap penurunan angka kemiskinan khususnya pada keluarga penerima manfaat PKH di Kecamatan Kesamben. Subjek penelitian meliputi keluarga penerima manfaat PKH dan tidak mencakup keluarga yang tidak terdaftar dalam program ini.
- 1.2.3 Jenis Bantuan Sosial: Fokus penelitian ini adalah pada bantuan sosial yang diberikan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), termasuk bantuan tunai dan pendampingan sosial yang terkait. Penelitian ini tidak akan mencakup jenis bantuan sosial lain di luar PKH yang mungkin tersedia di Kecamatan Kesamben.
- 1.2.4 Aspek Penurunan Kemiskinan: Penelitian ini akan memfokuskan pada aspek penurunan angka kemiskinan yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif, seperti perubahan dalam status ekonomi keluarga, akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, dan kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat. Penelitian ini tidak akan membahas faktor-faktor eksternal yang tidak terkait langsung dengan PKH.
- 1.2.5 Periode Waktu: Penelitian ini mencakup data dan analisis yang relevan selama 5 tahun, dimulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 bansos PKH yang berlangsung di Kecamatan Kesamben sesuai dengan data yang tersedia. Penelitian ini tidak akan mencakup data dari periode sebelum atau sesudah program PKH.
- 1.2.6 Metodologi: Metodologi penelitian akan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk menganalisis dampak PKH terhadap

penurunan angka kemiskinan. Penelitian ini tidak akan menggunakan metodologi lain yang mungkin digunakan dalam penelitian tentang kemiskinan dan bantuan sosial.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Bagaimana pengaruh bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan akses keluarga miskin terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial?
- 1.3.2 Apa saja tantangan yang dihadapi oleh penerima manfaat PKH dalam memanfaatkan bantuan yang diberikan?
- 1.3.3 Bagaimana peran data dan monitoring dalam memastikan bahwa bantuan PKH tepat sasaran?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- 1.4.1 Mengevaluasi pengaruh bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan akses keluarga miskin terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
- 1.4.2 Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh keluarga penerima manfaat dalam memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh PKH.
- 1.4.3 Menganalisis peran data yang akurat dan monitoring dalam memastikan bahwa bantuan PKH tepat sasaran dan efektif.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Pengembangan Ilmu Pengetahuan: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai pengaruh program bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH), dalam konteks penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi lebih lanjut tentang intervensi sosial dan dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan.

Kontribusi terhadap Teori Pemberdayaan Sosial: Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pemberdayaan sosial dengan menguji bagaimana pendekatan holistik dalam PKH dapat mempengaruhi kemampuan keluarga miskin untuk mandiri dan keluar dari kemiskinan.

1.5.2 Manfaat Praktis

Rekomendasi Kebijakan: Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Sosial, dalam memperbaiki dan mengoptimalkan pelaksanaan PKH. Temuan terkait tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh keluarga penerima manfaat dapat digunakan untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Program: Penelitian ini dapat memberikan masukan untuk perbaikan pelaksanaan program-program sejenis di masa depan, baik di tingkat nasional maupun daerah, dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan PKH.

Peningkatan Sinergi Antar-Pemangku Kepentingan: Penelitian ini dapat mendorong peningkatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam upaya pengentasan kemiskinan, dengan menunjukkan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung keberhasilan PKH.

1.5.3 Manfaat Sosial

Pemberdayaan Keluarga Miskin: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai cara-cara yang lebih efektif untuk memberdayakan keluarga miskin agar mereka dapat mencapai kemandirian ekonomi dan sosial. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Kesadaran Publik: Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya program-program bantuan sosial seperti PKH dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program-program tersebut.

1.6 Definisi Operasional

Agar tidak terjadi salah penafsiran dalam penelitian ini, maka perlu didefinisikan beberapa istilah berikut:

1.6.1 Kemiskinan

1.6.1.1 Definisi: Kemiskinan merujuk pada kondisi di mana individu atau keluarga tidak memiliki akses yang memadai terhadap kebutuhan dasar untuk hidup layak, termasuk pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Variabel terikat ini mencerminkan hasil dari berbagai

intervensi program sosial, seperti PKH, dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan (Herman, 2016:20)⁷.

1.6.1.2 Indikator: Jumlah pendapatan di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, kondisi perumahan yang tidak layak, dan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar lainnya.

1.6.2 Program Keluarga Harapan (PKH)

1.6.2.1 Definisi: PKH adalah program bantuan sosial bersyarat yang diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial, dengan tujuan untuk meningkatkan akses keluarga miskin terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial (Kementerian Sosial, 2021:15)⁸.

1.6.2.2 Indikator: Jumlah bantuan tunai yang diterima, frekuensi dan jenis layanan kesehatan dan pendidikan yang diakses oleh keluarga penerima manfaat, serta keterlibatan dalam kegiatan pendampingan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah.

1.6.3 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

1.6.3.1 Definisi: Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam penelitian ini merujuk pada keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memenuhi kriteria untuk menerima bantuan PKH (Kementerian Sosial, 2021;10)⁹.

1.6.3.2 Indikator: Status penerimaan bantuan dari PKH, karakteristik demografis keluarga (jumlah anggota keluarga, usia, jenis kelamin), dan status sosial ekonomi (pendapatan, pekerjaan, kondisi perumahan).

1.6.4 Akses Layanan Kesehatan

1.6.4.1 Definisi: Akses layanan kesehatan dalam penelitian ini merujuk pada kemampuan keluarga penerima manfaat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak, termasuk pemeriksaan kehamilan, imunisasi, serta pemeriksaan dan pengobatan penyakit (Sari W. Indarti, 2020:80)¹⁰.

1.6.4.2 Indikator: Jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan, jenis layanan kesehatan yang diterima, dan keteraturan dalam mengakses layanan kesehatan yang direkomendasikan.

1.6.5 Akses Layanan Pendidikan

1.6.5.1 Definisi: Akses layanan pendidikan merujuk pada kemampuan anak-anak dalam keluarga penerima manfaat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan formal, mulai dari pendidikan dasar hingga menengah (Budi A. Prasetyo, 2020:40-60).

1.6.5.2 Indikator: Tingkat partisipasi sekolah, tingkat kehadiran, pencapaian akademik, dan akses terhadap fasilitas pendukung pendidikan seperti buku dan seragam.

1.6.6 Pendekatan Holistik

1.6.6.1 Definisi: Pendekatan holistik dalam konteks PKH merujuk pada strategi yang mengintegrasikan berbagai aspek intervensi sosial, mulai dari bantuan tunai hingga pendampingan sosial, untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kemandirian ekonomi serta sosial keluarga penerima manfaat (Rina Purnama, 2021:40-65).

1.6.6.2 Indikator: Keterlibatan dalam program pendampingan sosial, perubahan dalam perilaku keluarga terkait pengelolaan keuangan dan akses layanan

dasar, serta tingkat kemandirian yang dicapai setelah menerima bantuan PKH.

1.6.7 Kemandirian Ekonomi dan Sosial

1.6.7.1 Definisi: Kemandirian ekonomi dan sosial merujuk pada kemampuan keluarga penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka tanpa ketergantungan pada bantuan sosial, serta partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi (Andi S. Prabowo, 2021:30-55).

1.6.7.2 Indikator: Peningkatan pendapatan keluarga, diversifikasi sumber pendapatan, pengurangan ketergantungan pada bantuan sosial, serta partisipasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi di komunitas.



